



**KPU**  
PROVINSI JAMBI

# LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA KPU PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2021 (*Audited*)



[www.jambi.kpu.go.id](http://www.jambi.kpu.go.id)



KPU Provinsi Jambi



[kpu\\_provinsi\\_jambi](https://www.instagram.com/kpu_provinsi_jambi)



[@kpujambi](https://twitter.com/kpujambi)



[KPU Provinsi Jambi](https://www.youtube.com/KPUProvinsiJambi)



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Provinsi Jambi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jambi, Januari 2022  
Kepala Pengguna Anggaran  
Sekretaris KPU Provinsi Jambi



**H.KHOIRUL BAHRI LUBIS S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196801202089081001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	61



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Jln. Jend. A. Thalib Nomor. 33 Jambi Telp. ( 0741 ) 670121, 670771 / Fax. ( 0741 ) 670772

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tingkat Satker yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretaris KPU Provinsi Jambi



  
**H. KHOIRUL BAHRI LUBIS S. Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196801202089081001

Laporan Keuangan KPU Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember TA 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 166.340.765,- yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp 19.149.006.805 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 19.211.562.000 .

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II TA 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.482.277.336 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 12.372.200; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 1.469.905.136; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 18.879.000 dan Rp 1.463.398.336.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 0 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (19.610.451.096). Difisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp

166.340.765 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (19.444.110.331).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 54.214.456.280 dikurangi Defisit-LO sebesar (19.444.110.331) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6.349.433.3863 terjadi penurunan Ekuitas senilai Rp 52.751.057.944 sehingga Ekuitas akhir pada Semester II TA 2021 adalah senilai Rp 1.463.398.336.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Semester II TA 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TA 2021 DAN 2020

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	166.340.765	0,00	90.794.327
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>166.340.765</b>	<b>0,00</b>	<b>90.794.327</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	4.656.524.000	4.649.273.649	99,84	4.359.321.947
Belanja Barang	B.4	14.509.191.000	14.453.886.156	99,62	128.128.385.439
Belanja Modal	B.5	45.847.000	45.847.000	100,00	275.983.000
<b>PINJAMAN DAN HIBAH</b>	B.6				
Belanja Barang		-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>19.211.562.000</b>	<b>19.149.006.805</b>	<b>99,67</b>	<b>132.763.690.386</b>

## II. NERACA

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NERACA PER SEMESTER II TA 2021 DAN 2020

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	52.235.441.518
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.4	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Persediaan		12.372.200	27.273.500
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>12.372.200</b>	<b>52.262.715.018</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.7	4.357.678.818	4.343.228.818
Akumulasi Penyusutan	C.8	(2.887.773.682)	(2.391.487.556)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>1.469.905.136</b>	<b>1.951.741.262</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-Lain	C.9	153.153.500	121.765.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(153.153.500)	(121.765.500)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.482.277.336</b>	<b>54.214.456.280</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	18.879.000	-
Uang Muka dari KPPN	C.12	-	-
Hibah yang belum Disahkan	C.13	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>18.879.000</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>18.879.000</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.14	1.463.398.336	54.214.456.280
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.463.398.336</b>	<b>54.214.456.280</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.482.277.336</b>	<b>54.214.456.280</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TA 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Perpajakan	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	5.851.827	(5.851.827)
Pendapatan Hibah	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>-</b>	<b>5.851.827</b>	<b>(5.851.827)</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	4.668.152.649	4.359.321.947	308.830.702
Beban Persediaan	97.799.350	994.726.370	(896.927.020)
Beban Barang dan Jasa	9.697.017.182	104.621.830.105	(94.924.812.923)
Beban Pemeliharaan	539.733.843	547.858.992	(8.125.149)
Beban Perjalanan Dinas	4.080.064.945	16.159.208.874	(12.079.143.929)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	527.683.127	501.400.833	26.282.294
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>19.610.451.096</b>	<b>127.184.347.121</b>	<b>(107.573.896.025)</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(19.610.451.096)</b>	<b>(127.178.495.294)</b>	<b>107.568.044.198</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>166.340.765</b>	<b>1.103.822.570</b>	<b>(937.481.805)</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	166.340.765	1.104.622.500	(938.281.735)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	799.930	(799.930)
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>166.340.765</b>	<b>1.103.822.570</b>	<b>(937.481.805)</b>
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>166.340.765</b>	<b>1.103.822.570</b>	<b>(937.481.805)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	<b>(19.444.110.331)</b>	<b>(126.074.672.724)</b>	<b>106.630.562.393</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TA 2021 DAN 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	54.214.456.280	49.927.764.313
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19.444.110.331)	(126.074.672.724)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(39.656.380.996)	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	1	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Koreksi Lain-lain	(39.656.380.997)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	6,349,433,383	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Setoran Surplus BLU	-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(52.751.057.944)	4.286.691.967
EKUITAS AKHIR	1.463.398.336	54.214.456.280

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Provinsi Jambi

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2021.

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

KPU Provinsi Jambi sebagai lembaga non struktural adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat provinsi secara hierarkis bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. KPU Provinsi Jambi Berkedudukan di Jalan A. Thalib No. 33 Jambi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum.

### **Visi Komisi Pemilihan Umum**

*“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, Profesional Mandiri, Transparan dan Akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

### **Misi Komisi Pemilihan Umum**

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2021-2025 sebagai berikut;

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, Kredibilitas dan Kapabilitas

- dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akutabel, edukatif dan beradab;
  - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan Efektif;
  - d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

### **Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan Kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

KPU Provinsi Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Provinsi

Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh

dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Januari s/d Semester II TA 2021 , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melakukan revisi POK,Revisi Tingkat DJPB dan revisi DIPA dari pusat sebanyak tiga belas kali pada bulan Februari, April, Juni, Juli, September, Oktober, dan November 2021. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut;

*Rincian Pendapatan Dan Jenis Belanja*

Uraian	2021	
	ANGGARAN	REALISASI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	0	166.340.765
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>166.340.765</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	4.656.524.000	4.649.273.649
Belanja Barang	14.509.191.000	14.453.886.156
Belanja Modal	45.847.000	45.847.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.211.562.000</b>	<b>19.149.006.805</b>

### *Realisasi*

### *Pendapatan*

*Rp.166.340.765*

### **B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp 166.340.765 yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam DIPA Tahun 2021. Pendapatan KPU Provinsi Jambi terdiri dari Pendapatan Lain-lain berupa pendapatan Penerimaan dalam Negeri yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.166.340.765. Penerimaan itu berasal dari Setoran Pengembalian Kelebihan Realisasi Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020, Pengembalian Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2021 dan Pengembalian Realisasi Belanja Pegawai Tahun yang Lalu dengan rincian sebagai

berikut:

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai berikut:

No.	Nilai	NTPN/SP2D	Tanggal Setor	Keterangan
1	Rp 2.410.000	2EFF07QLTT2L7RNT	27 April 2021	Pengembalian Kelebihan Realisasi KPU Kota Jambi Tahun 2020
2	Rp 11.230.000	8570A1JNF31UCRBK	28 April 2021	Pengembalian Kelebihan Realisasi KPU Kab Merangin Tahun 2020
3	Rp 2.256.000	BE44761QU7TSDOV8	27 April 2021	Pengembalian Kelebihan Realisasi KPU Kab Tebo Tahun 2020
4	Rp 2.874.611	BE29C7QLTT2L7N14	27 April 2021	Pengembalian Kelebihan Realisasi KPU Kab Batanghari Tahun 2020
5	Rp 35.540.000	B340561QU805GP4V	03 May 2021	Pengembalian Temuan BPK Pokja Tanjab Timur
6	Rp 35.680.000	0C77455DEDDP3NJ3	03 May 2021	Pengembalian Temuan BPK Pokja Batanghari
7	Rp 36.460.000	515701JNF347FOGV	06 May 2021	Pengembalian Temuan BPK Pokja Tanjab Barat
8	Rp 39.890.000	24EF13CIEO909MKK	03 May 2021	Pengembalian Temuan BPK Pokja Provinsi Jambi
9	Rp 154	00013/SPM-KEKURANGANHAJI/III/2021	02 March 2021	Pembayaran Belanja Pegawai atas Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat a.n Khoiril Bahri Lubis
	<b>Rp166.340.765</b>			

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penadapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Lain-Lain		166.340.765	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>166.340.765</b>	

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	166.340.765	90.794.327
<b>Jumlah</b>	<b>166.340.765</b>	<b>90.794.327</b>

## Realisasi

### Belanja Negara

Rp19.149.006.805

## B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja KPU Provinsi Jambi Periode Semester II TA 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 19.149.006.805 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp. 19.211.562.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	4.656.524.000	4.649.273.649	99,84
Belanja Barang	14.509.191.000	14.453.886.156	99,62
Belanja Modal	45.847.000	45.847.000	100,00
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Barang	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.211.562.000</b>	<b>19.149.006.805</b>	<b>99,67</b>

Realisasi Belanja Semester II TA 2021 mengalami penurunan sebesar 85,58% dibandingkan realisasi belanja pada Semester yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pada Tahun 2021, tidak adanya kegiatan Tahapan Pemilu.

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	4.649.273.649	4.359.321.947	6,65
Belanja Barang	14.453.886.156	128.128.385.439	(88,72)
Belanja Modal	45.847.000	275.983.000	(83,39)
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Barang	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.149.006.805</b>	<b>132.763.690.386</b>	<b>(85,58)</b>

## Belanja

### Pegawai

Rp. 4.649.273.649

## B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 masing-masing Sebesar Rp. 4.649.273.649 dan Rp. 4.359.321.947.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 6.65% persen dari TA 2020, dikarenakan adanya Penambahan Pegawai dan adanya pembayaran uang lembur pada Tahun 2021.

**Tabel 9**  
**Perbandingan Belanja Pegawai Semester TA 2021 dan TA 2020**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	1.348.737.180	1.235.526.560	9%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.563	17.690	16%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	94.876.930	86.316.740	10%
Belanja Tunj. Anak PNS	30.305.134	29.240.350	4%
Belanja Tunj. Struktural PNS	128.660.000	123.610.000	4%
Belanja Tunj. PPh PNS	5.854.750	3.660.250	60%
Belanja Tunj. Beras PNS	83.789.940	69.305.940	21%
Belanja Uang makan PNS	171.033.000	162.360.000	5%
Belanja Tunjangan Umum PNS	54.620.000	47.775.000	14%
Belanja Uang Lembur	81.114.000	-	0%
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	2.650.262.152	2.601.509.417	2%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.649.273.649</b>	<b>4.359.321.947</b>	<b>6,65%</b>

*Belanja*

*Barang*

*Rp14.453.886.156*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir Semester II TA 2021 sebesar Rp 14.453.886.156 atau 100 persen dari Anggaran Rp 14.509.191.000,- Realisasi Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 14.453.886.156 dan Rp 128.128.385.439.

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 89 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2020 pada semester yang sama. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran Tahapan Pemilu.

*Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	723.240.091	743.605.544	-3%
Belanja Barang Non Operasional	8.491.195.270	97.835.931.371	-91%
Belanja Persediaan	138.125.186	6.804.252.468	-98%
Belanja Jasa	482.581.821	6.042.293.190	-92%
Belanja Pemeliharaan	538.678.843	543.093.992	-1%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.080.064.945	16.159.467.074	-75%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>14.453.886.156</b>	<b>128.128.643.639</b>	<b>-89%</b>
Pengembalian Belanja	-	258.200	0%
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>14.453.886.156</b>	<b>128.128.385.439</b>	<b>-89%</b>

*Belanja Modal  
Rp 45.847.000*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per Semester II TA 2021 dan Semester II Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 45.847.00 dan Rp 275.983.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.847.000	275.983.000	6,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
Belanja Modal Lainnya			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>45.847.000</b>	<b>275.983.000</b>	<b>6,02</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>45.847.000</b>	<b>275.983.000</b>	<b>6,02</b>

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal per Semester II TA 2021 dan Semester III TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Tanah di KPU Provinsi Jambi.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp 45.847.000 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Semester II TA 2020 sebesar 602%. Penurunan disebabkan untuk pembelanjaan modal peralatan mesin tidak dianggarkan dari dana Rutin 2021.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.847.000	275.983.000	602%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0%
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0%
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>45.847.000</b>	<b>275.983.000</b>	<b>602%</b>
Pengembalian	0	0	0%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>45.847.000</b>	<b>275.983.000</b>	<b>602%</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Semester II TA 2021 terdiri dari :

- a. Pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) CS1238 Cap 1200VA/600W sebanyak 10 Buah senilai Rp 16.700.000,-
- b. Pembelian External/Portable Hardisk WD New My Passport Eks 2TB sebanyak 6 Buah senilai Rp 7.020.000,-
- c. Pembelian Printer Brother DCP T510W Refilltank Print sebanyak 3 Buah senilai Rp 9.450.000,-
- d. Pembelian Tripod Camera Fotopro X-Go HR Both DSLR Diameter 25 sebanyak 3 Buah senilai Rp 3.930.000,-
- e. Pembelian Lampu Blitz Kamera Yongnuo 560 Mark IV Flash Universal 35mm sebanyak 2 Buah senilai Rp 2.322.00,-
- f. Pembelian Monopod Moza Air Cross 2 Pro Gimbal Stabilizer Sebanyak 1 Buah senilai Rp 6.425.000.

### ***B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan per Semester II TA 2021 dan Semester II 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak Dianggarkanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan di KPU Provinsi Jambi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan			0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan per Semester II TA 2021 dan Semester II 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di KPU Provinsi Jambi.

##### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	RELAISASI TA 2021	RELAISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan			0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per Semester II TA 2021 dan Semester II 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Lainnya.

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12

## Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	T.A. 2021	T.A. 2020
1	Bank BNI Cabang Jambi	-	-
2	Uang Tunai	-	-
Jumlah		-	-

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp.0,-*

## C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

KPU Provinsi Jambi tidak melakukan pengelolaan pendapatan, jadi tidak memiliki bendahara penerimaan.

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp 0*

## C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 per Semester II TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 52.235.441.518.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu Sisa dana Hibah Yang belum dilaksanakan/direalisasikan.

Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 13

## Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	TA 2021	TA 2020
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	-	-
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	-	-
3	Saldo dana Hibah Pilgub 2020	-	52.235.441.518
4	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	-	-
5	Hibah Yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah		-	52.235.441.518

Piutang PNB  
Rp.0,-

#### C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal Semester II TA 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0 . Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2021 dan 2020*

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp.0,-

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2021 dan per Semester III 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2021 dan 2020*

No	Satker	Tahun 2021	Tahun 2020
1	KPU Provinsi Jambi	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar

TPA

Rp0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal per Semester II TA 2021 dan per Semester III 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA  
Per 31 Desember 2021 dan TA 2020

No	Satker	Tahun 2021	Tahun 2020
1	KPU Provinsi Jambi	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih -

Piutang Lancar

Rp 0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per tanggal per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  
TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

*Belanja Dibayar  
di Muka Rp0*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2021 dan 2020*

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp.0,-*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

KPU Provinsi Jambi tidak memiliki Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020.

*Persediaan  
Rp14.901.500*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp12.372.200 dan Rp27.273.500.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per Semester II TA 2021 dan Semester II 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 14 Rincian Persediaan*

No	Persediaan	TA 2021	TA 2020
1	Barang Konsumsi	12.372.000	27.273.500
2	Barang untuk Pemeliharaan		-
3	Suku Cadang	-	-
4	Barang Persediaan Lainnya Dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	-
5	Bahan Baku	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>12.372.000</b>	<b>27.273.500</b>

Dari neraca diatas dapat dilihat bahwasanya terdapat mutasi sebesar Rp. 14.901.500 yang terdiri dari mutasi kurang Barang Konsumsi. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berdasarkan berita acara Stock Opname Fisik.

*Tagihan TP/TGR* **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
*Rp.0,-*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR*

*TA 2021 dan 2020*

No	Satker	Tahun 2021	Tahun 2020
1	KPU Provinsi Jambi	-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan Penjualan Angsuran* **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**  
*Rp.0,-*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Rincian Tagihan TPA*

No	Satker	Tahun 2021	Tahun 2020
1	KPU Provinsi Jambi	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp.0,-

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah  
Rp0

### C.14 Tanah

KPU Provinsi Jambi tidak memiliki Nilai aset tetap berupa tanah per Semester II TA 2021 dan per Semester II 2020.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp4.357.678.818

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah Rp 4.357.678.818 dan Rp 4.343.228.818. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>4,343,228,818</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	45,847,000
Hibah (Reward Bank dari Hibah)		
Reklasifikasi Masuk	Rp	1,576,478,800
Mutasi kurang:		
reklasifikasi keluar	Rp	1,576,478,800
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	31,397,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tidak digunakan		
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>4,357,678,818</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	(2,887,773,682)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>1,469,905,136</b>

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi transaksi Penambahan Peralatan dan Mesin terdiri Pembelian barang dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) CS1238 Cap 1200VA/600W sebanyak 10 Buah senilai Rp 16.700.000,-
- 2) Pembelian External/Portable Hardisk WD New My Passport Eks 2TB sebanyak 6 Buah senilai Rp 7.020.000,-
- 3) Pembelian Printer Brother DCP T510W Refilltank Print sebanyak 3 Buah senilai Rp 9.450.000,-
- 4) Pembelian Tripod Camera Fotopro X-Go HR Both DSLR Diameter 25 sebanyak 3 Buah senilai Rp 3.930.000,-
- 5) Pembelian Lampun Blitz Kamera Yongnuo 560 Mark IV Flash Universal 35mm sebanyak 2 Buah senilai Rp 2.322.00,-
- 6) Pembelian Monopod Moza Air Cross 2 Pro Gimbal Stabilizer Sebanyak 1 Buah senilai Rp 6.425.000.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp.1.576.478.000,- berasal dari Reklasifikasi keluar asbab perubahan kodefikasi aset. Dan Benambahan sebesar Rp.31.397.000 berasal dari Aset yang di hentikan dari penggunaannya.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp0*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Untuk periode 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 KPU Provinsi Jambi tidak memiliki aset berupa gedung dan bangunan. Adapun Tanah beserta Gedung dan Bangunan di atasnya merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang dipinjam pakaikan ke KPU Provinsi Jambi. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.0* **C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Untuk periode 31 Desember 2021 dan per per 31 Desember 2020 KPU Provinsi Jambi tidak terdapat Aset Berupa Jalan Irigasi dan Jaringan.

*Aset Tetap Lainnya Rp.0,-* **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Untuk periode 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 KPU Provinsi Jambi tidak terdapat Aset Berupa Aset Tetap Lainnya.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,-* **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Untuk periode 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 KPU Provinsi Jambi tidak terdapat Aset Berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (2.887.773.682)* **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(2.887.773.682) dan Rp(2.391.487.556).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.357.678.818	Rp (2.887.773.682)	Rp 1.469.905.136
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 4.357.678.818</b>	<b>Rp (2.887.773.682)</b>	<b>Rp 1.469.905.136</b>

*Aset Tak  
Berwujud Rp.0,-*

### C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Semester II TA 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.0,- dan Rp.0,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021

Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-

**Saldo per 31 Desember 2021** -

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 -

**Nilai Buku per 31 Desember 2021** -

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Aset Tak berwujud

No.	Satker	Uraian	Nilai
1	KPU Provinsi Jambi		Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

*Aset Lain-Lain  
Rp153.153.500*

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 adalah Rp 153.153.500 dan Rp 121.756.500.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor KPU Provinsi Jambi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp 153.153.500</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap (Penghentian penggunaan)	Rp -
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	Rp -
<b>Saldo per 301 Desember 2021</b>	<b>Rp 153.153.500</b>
Akumulasi Penyusutan	Rp (153.153.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp -</b>

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp (153.153.500)*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Semester II TA 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(153.153.500) dan Rp(121.756.500). Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	153.153.500	153.153.500	0
<b>Jumlah</b>	<b>153.153.500</b>	<b>153.153.500</b>	<b>0</b>

*Uang Muka dari KPPN Rp0,-*

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Keterangan SATKER	Tahun 2021
	Uang Tunai
KPU Provinsi Jambi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp.18.879.000,-*

### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per Semester 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.879.000 dan Rp0.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan berupa uang makan pegawai bulan Desember 2021. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Provinsi Jambi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Belum Dibayarkan	Rp 18,879,000
2	Belanja Barang yang Belum Dibayarkan	Rp -
3	Belanja Lainnya yang Belum Dibayarkan	Rp -
<b>Total</b>		<b>Rp 18,879,000</b>

*Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0*

### C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBK, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal Semester II TA 2021 .

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp.0,-*

### **C.27 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp.0,-*

### **C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Untuk periode laporan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, KPU Provinsi Jambi tidak memiliki Pendapatan Diterima di Muka.

*Ekuitas  
Rp1.463.398.336*

### **C. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.463.398.336 dan Rp54.214.456.280.

*Pendapatan  
PNBP  
Rp0,-*

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)-LO pada per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan PNBPN-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNBPN karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara.

Pendapatan PNBPN TA 2021 sebesar Rp0 merupakan berasal dari Setoran Pengembalian atas Laporan Pemeriksaan Kinerja KPU Provinsi Jambi TA 2021 oleh BPK dan

Pendapatan Denda keterlambatan Kontrak Pekerjaan Alat Peraga Kampanye.

*Rincian Pendapatan PNBP-LO TA 2021 dan 2020*

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Pegawai*

*Rp4.668.152.649*

## D.2 Beban Pegawai

Beban pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.668.152.649 dan Rp4.359.321.947.

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 20*

*Rincian Beban Pegawai pada 2020 dan 2020*

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji	1.917.897.497	1.757.812.530	9,11
Beban Tunjangan	2.650.262.152	2.601.509.417	2
Beban Belanja Pegawai yang harus dibayar	18.879.000	-	
Beban Lembur	81.114.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.668.152.649</b>	<b>4.359.321.947</b>	7,08

## D.3 Beban Persediaan

*Beban*

*Persediaan*

*Rp97.799.350*

Beban Persediaan per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 adalah sebesar masing-masing Rp97.799.350 dan Rp994.726.370.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 adalah sebagai berikut. *Tabel 21*

*Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020*

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	97.799.350	994.726.370	(90,17)
Beban Persediaan pita,cukai,leges,materai	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>97.799.350</b>	<b>994.726.370</b>	(90,17)

*Beban Barang dan Jasa  
Rp9.697.017.182*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban jasa per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 masing-masing sebesar Rp9.697.017.182 dan Rp104.621.830.105.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	189.584.300	176.860.100	7,19
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	210.500	742.500	(71,65)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	79.350.000	79.980.000	(0,79)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.160.000		0,00
Beban Bahan	702.478.615	648.509.765	8,32
Beban Honor Output Kegiatan	6.382.706.390	5.746.700.000	11,07
Beban Barang Non Operasional Lainnya	768.476.615	300.641.465	
Beban Langganan Listrik	30.165.371	42.376.921	(28,82)
Beban Langganan Telepon	680.506	3.200.612	(78,74)
Beban Langganan Air	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	180.300.000		#DIV/0!
Beban Sewa	500.000	37.250.000	(98,66)
Beban Jasa Profesi	500.000	2.100.000	(76,19)
Beban Jasa Lainnya	139.512.500	221.633.459	(37,05)
Beban Jasa - Penanganan Covid-19	2.895.000		0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.479.519.797</b>	<b>7.259.994.822</b>	<b>16,80</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp539.733.843*

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp539.733.843 dan Rp547.858.992. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	213.809.953	207.831.115	2,88
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	324.868.890	335.262.877	(3,10)
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	1.055.000	4.762.000	(77,85)
<b>Jumlah</b>	<b>539.733.843</b>	<b>547.855.992</b>	<b>(1,48)</b>

*Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp4.080.064.945*

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.080.064.945 dan Rp16.159.208.874.

Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas

untuk per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 24*

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.288.617.965	7.291.495.396	-68,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	427.153.000	4.863.987.782	-91,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.331.705.080	3.882.086.296	-65,70
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.588.900	121.639.400	-73,21
<b>Jumlah</b>	<b>4.080.064.945</b>	<b>16.159.208.874</b>	<b>-74,75</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp 0,-*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per Semester II 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31  
Desember 2021 dan 31 Desember  
2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp.0,-*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban bantuan sosial per Semester II TA 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Beban bantuan social merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko social dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Beban Bansos untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp527.683.127*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 527.683.127 dan Rp501.400.833.

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per Semester II TA 2021 dan per Semester II TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2021 dan 2020*

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	527.683.127	501.400.833	5,24
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			-
<b>Jumlah</b>	<b>527.683.127</b>	<b>501.400.833</b>	5,24

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp.0,-*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp166.340.765

#### D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per Semester II TA 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Kegiatan Non Operasional

TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	166.340.765	1.104.622.500	
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	799.930	
<b>Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional lainnya</b>	<b>166.340.765</b>	<b>1.103.822.570</b>	(84,93)

Pos Luar Biasa  
Rp.0,-

#### D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per Semester II TA 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Pos Luar Biasa Per 2020 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Pos Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal* **E.1 Ekuitas Awal**  
*Rp54.214.456.280* Nilai ekuitas Awal per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 54.214.456.280 dan Rp 49.927.764.313  
*0*

*Surplus(defisit)* **E. 2 Surplus (Defisit) LO**  
*LO* Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(19.444.110.331) dan Rp(126.074.672.724).  
*Rp(19.444.110.331)*

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

### E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

*Penyesuaian* **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**  
*Nilai Aset* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.  
*Rp 0*

*Koreksi Nilai  
Persediaan*

*Rp 0*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester II per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk per Semester II per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Nilai Persediaan TA 2021*

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp.  
1*

### **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Koreksi atas reklasifikasi merupakan hasil rekalisasi Masuk dan Reklasifikasi keluar yang dihasilkan oleh aplikasi sehingga nilai dari Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir Semester II per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp 0*

### **E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir Semester II per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai  
Aset Tetap Non  
Revaluasi  
Rp 0*

### **E.3.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir Semester per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi*

*TA 2021 dan 2020*

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Nilai Koreksi</b>
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-Lain* **E.3.7 Koreksi Lain-lain**

*Rp 0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir Semester II per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Transaksi Antar  
Entitas* **E. 4 Transaksi Antar Entitas**

*Rp6.349.433.383*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk per per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.349.433.383 dan Rp130.361.364.691.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.569.946.284
Diterima dari Entitas Lain	166.340.765
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	54.172.136
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.349.433.383</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Semester II TA 2021, DKEL sebesar Rp.6.569.946.284 sedangkan DDEL sebesar Rp 166.340.765,-

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal Semester II TA 2021 sebesar Rp0 dan Rp54.172.136.

Sedangkan Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal Semester II 31 Desember 2020 sebesar Rp 42.721.336 dan Rp0.

#### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan Semester II TA 2021 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal Semester II TA 2021 adalah Rp0.

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.463.398.336 dan Rp54.214.456.280.

### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada saat penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan aplikasi Persediaan Versi 21.0.0.FIFO, aplikasi SIMAK BMN Versi 21.0.0 Tahun 2021, dan SAIBA Versi 21.0.0 tanggal 25 Juni 2021.

#### **F.2 REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah:

PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. KC M JL MENTENG RAYA NO 76 Nomor Rekening 9890766543221000 a.n. BPG 012 KPU PROV. JAMBI yang masih aktif/digunakan sampai dengan sekarang.

Rekening pemerintah yang digunakan dalam Kegiatan operasional Pemilihan Serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah BANK 9 JAMBI Cabang Utama Nomor Rekening 3002773014 a.n RPL012 PDHL

KPUPROVJBI UTK 2BN8XTDA, dan rekening ditutup pada bulan September Tahun 2021.

### **F.3 PENGELOLAAN KEUANGAN, PEGAWAI DAN KANTOR KPU PROVINSI JAMBI**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jambi Nomor 01/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Anggaran Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran: H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos

PPK : Dian Marianni, S.H

PPSPM : Dian Asmara, S.IP

Bendahara : Ahmad Salim, A.Md

### **F.4 PENGUNGKAPAN LAINNYA**

#### **F.4.1 Dana Hibah dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2021.**

KPU Provinsi Jambi pada Tahun 2021 mendapat HIBAH Langsung dalam Bentuk uang dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Provinsi Jambi dengan KPU Provinsi Jambi Nomor : 11/NPHD/BAKEUDA/IX/2020 dan Nomor : 594/KU.07-SPJ/15/KPU/IX/2020 tanggal 30 September 2020

tentang Pelaksanaan dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020. sebesar Rp 180.475.012.050,- Pencairan Hibah tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap, tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp 50.000.000.000,- tahap kedua tahun 2020 sebesar Rp 112.475.012.050,- dan tahap ke tiga tahun 2020 sebesar Rp. 18.000.000.000,-

Hibah dalam bentuk uang tersebut telah diregistrasi ke ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jambi tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor register 2BN8XTDA. Sampai dengan tahap pelaporan 31 Desember 2021 Register tersebut diperpanjang masa Penarikan dari semula 31 Maret 2021 di perpanjang menjadi sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nomor Surat Perubahan Batas penarikan pada register hibah S-265/WPB.06/2021 tanggal 30 Maret 2021

KPU Provinsi Jambi telah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya berupa Rekening Penampung Langsung (RPL) Hibah dengan Surat izin Pembukaan Rekening oleh KPPN Jambi Nomor S-1729/WPB.06/KP.0104/2020 pada tanggal 08 Oktober 2020, dan Rekening Penampung Sementara (RPS) Hibah dengan Surat izin Pembukaan Rekening oleh KPPN Jambi Nomor S-1848/WPB.06/KP.0104/2020 pada tanggal 29 Oktober 2020.

Pemerintah Daerah telah mentransfer Dana Hibah tahap pertama dengan nilai sebesar Rp 50.000.000.000,- pada tahun anggaran 2020, Pencairan Dana Hibah tahap kedua telah diterima oleh KPU Provinsi Jambi sebesar Rp 112.475.012.050,- tertanggal 22 Juni 2020, sehingga total seluruhnya per 31 Desember 2021 sebesar

Rp.162.475.012.050.

Pada tahun anggaran 2020 telah disahkan dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 128.239.570.532,-. Sehingga pada awal tahun anggaran 2021 yang dimasukkan kedalam DIPA tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 52.235.441.518.

Sampai dengan Pada tanggal 31 Desember 2021 KPU Provinsi Jambi juga mendapatkan Reward Bank atas penempatan dana Hibah Pemilihan Gubernur tahun 2020 pada Bank 9 Jambi senilai Rp. 1.019.303.000,- yang berbentuk barang dan telah diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai aset Negara.

Pada akhir 31 Desember 2021 dana hibah sebesar Rp.180.475.012.050 telah di realisasikan sebesar Rp. 140.818.631.053 dan sisa Anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp. 39.656.380.997 dan sudah di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi dengan Nomor Rekening : 101431703 pada tanggal 1 September 2021 dengan nomor STS : 0185/STS/kas/BUD/BAKEUDA/IX/2021.

Untuk Periode Akhir 31 Desember 2021 terdapat anggaran untuk penanganan Covid-19 pada KPU Provinsi Jambi dengan jumlah Pagu sebesar Rp. 46.685.000,- terbagi menjadi tiga akun yaitu akun 521131 sebesar Rp.39.780.000 dan akun 522192 sebesar Rp.6.904.000, dan Akun 521241 Sebesar Rp.1.000 total Realisasi seluruhnya pada akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.45.358.090.

Untuk periode akhir 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Revisi DIPA terakhir ke XIII dengan nomor DIPA-076.01.2.654322/2021 tanggal 29 November 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 19.211.562.000 yang terdiri dari Belanja APBN Rp.6.632.495.000 dan Hibah Langsung Sebesar Rp.12.579.067.000,-

#### F.4.2 Lain-Lain.

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 ada hal-hal yang perlu diungkap diantaranya ;

KPU Provinsi Jambi sampai dengan sekarang belum memiliki Aset berupa Bangunan Gedung Kantor, sedangkan Gedung Kantor yang digunakan sekarang merupakan Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretaris KPU Provinsi Jambi



**H. Choirul Bahri Lubis S.Sos**

Pembina TK I

NIP. 196801202089081001